

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMKOT BANJARMASIN MENURUN, OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALSEL MINTA DIPERBAIKI

Rabu, 15 Februari 2023 - Ita Wijayanti

BANJARMASIN - Standar pelayanan publik Pemerintah Kota Banjarmasin mengalami penurunan di tahun 2022.

Pemko berada di zona kuning. Dibanding tahun 2021 lalu, penilaian standar pelayanan publik, pemko berada di zona hijau.

Ini hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

Peningkatan pelayanan di Kota Banjarmasin yang masuk dalam kategori hijau, hanya ada satu SKPD, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan SKPD lainnya di kategori kuning.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman menjelaskan, keluarnya hasil penilaian tersebut bukan hanya menjadi atensi.

"Mesti harus ada aksi nyata di lapangan dalam hal peningkatan pelayanan. Secara umum masih masuk zona kuning, yang berarti kualitas pelayanan di daerah berada di tingkat sedang," ujarnya, Selasa (14/2).

Hal ini, lanjutnya, bukan berarti buruk. Tapi masih banyak ruang-ruang perbaikan atau hal-hal yang mestinya bisa ditingkatkan dan ada jaminan pelayanan yang mesti dilakukan.

Penilaian yang dilakukan pihaknya mengacu pada empat hal, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Ini berlaku secara nasional.

Ia mengungkapkan, dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, hanya ada lima pemda yang masuk dalam kategori hijau, yakni Tala, Tanbu, Tabalong, Balangan, dan Banjarbaru. Selebihnya, termasuk Kota Banjarmasin, berada di kategori kuning.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, secara keseluruhan penilaian pelayanan publik masih berada pada persentase nilai 69,63.

Ia mengimbau seluruh SKPD dapat meningkatkan mutu pelayan yang cepat dan maksimal. "Bersama biro organisasi akan kami coba koordinasikan terkait upaya-upaya peningkatan mutu," katanya.

Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Eka Rahayu mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi indikator apa saja yang dirasa masih lemah dalam pola pelayanan.

"Kami harus melihat kapasitas dari pelayanan kami sendiri. Memang ada beberapa pos yang perlu untuk ditingkatkan," katanya.